

MILIK PERPUSTAKAAN	
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
Diterima	: 15 NOV 2003
Inventarisasi	: 032/MH/Hd.11/2003
Klasifikasi	: Rf : 346.07/84/03
Katalog	:
Selesai diproses	:



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

TESIS

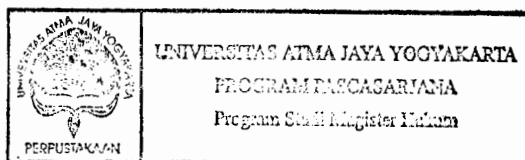
**PRESPEKTIF HUKUM PADA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK
PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA**

oleh :

SYAFWAN ZUBIR

No. Mhs. : 01.751/PS/MH

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER ILMU HUKUM
2003**





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Tesis/mh/2003

TANDA PENGESAHAN TESIS

N a m a : Syafwan Zublr
Nomor Mahasiswa : 01.751/PS/MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul tesis : Prespektif Hukum Pada Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pemerintah Melalui Kantor Pelayanan Plutang Dan Lelang Negara

Tanggal,

Tanggal,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.

Th. Anlta Christiani, SH., M.Hum.



Ketua Program,

PROGRAM
PASCASARJANA

Dr. MG. Endang Sumlarni, Dra., SH., M.Hum.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Program Studi Magister Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Tesis/gmh/2003

TESIS

**PRESPEKTIF HUKUM PADA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK
PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Syafwan Zublr, SH
No. Mhs : 01.751/PS/MH

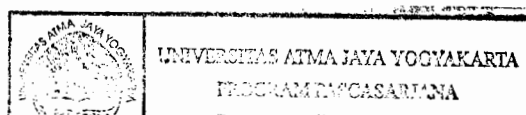
Tesis ini telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
pada tanggal : 2 Agustus 2003

Dewan Penguji :

E. Sundari, SH., M.Hum.
Ketua

Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.
Anggota

Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.
Anggota



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya pribadi dan bukan merupakan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah sebelumnya ada. Semua yang tertulis baik berupa data, teks, gambar, analisis, kesimpulan dan rekomendasi, kecuali yang telah secara tertulis diacu dalam tesis ini adalah karya saya dan merupakan hasil kerja pribadi.

Yogyakarta, 1 Juli 2003

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the date and name.

(Syafwan Zubir)

INTISARI

Perspektif Hukum pada pelaksanaan penyelesaian Kredit Macet pada bank pemerintah melalui kantor pelayanan piutang negara, Syafwan Zubir, NIRM 01.0751 / PS / MH, Juli 2003. Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Pasca Sarjana, Universitas Atmajaya.

Bank pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseoran (Persero) yang lebih separo sahamnya adalah milik Pemerintah, dan bertugas menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit secara efektif dan efisien dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Pemberian kredit kepada masyarakat ataupun Badan Hukum sering terjadi permasalahan kredit yang lebih dikenal dengan sebutan "Kredit Macet".

Terjadinya kredit macet disebabkan oleh faktor intern bank itu sendiri karena kekurangan kemampuan Manajemen Bank, faktor debitur, baik disengaja maupun tidak sengaja, debitur wanprestasi atau faktor ekstern seperti situasi ekonomi, politik dan bencana alam.

Kredit macet Bank Pemerintah di dalam Undang – Undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 disebut sebagai Piutang Negara, pertama – tama harus di selesaikan oleh Bank Pemberi Kredit, apabila tidak berhasil maka wajib diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Penyelesaian Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) terjadi dengan cara pembayaran seketika, dicicil atau diangsur dan pencairan barang jaminan.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum yang seimbang antara debitur dan kreditur, serta efektifitas dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam hal ini Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sebagai lembaga pelaksanaan penyelesaian piutang Negara berdasarkan Undang – Undang No. 49. Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara analisa data menggunakan metode kualitatif yang diuraikan dalam bentuk diskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan Penyelesaian Kredit Macet oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) belumlah bersifat maksimal dan efektif.

Karena Surat Pernyataan Bersama yang kekuatannya sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sering digugat oleh debitur begitu juga penilaian harga barang jaminan oleh Tim Taksasi walaupun sudah pasti menurut hukum namun belum lagi memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan secara menyeluruh untuk itu perlu merevisi atau mengamandemenkan Undang – Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Peraturan – Peraturan Pelaksananya demi tercapainya kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam penyelesaian kredit macet.

Kata Kunci : Kredit Macet, Bank Pemerintah, Penyelesaian kredit

ABSTRACT

Legal Perspective on the Execution of Non Performing Loan at Government Bank through State Receivable Service Office. Syafwan Zubir, NIRM 01.0751/PS/MH, July 2002 Business Law Concentration, Post-Graduate Program, Atmajaya University.

Government Bank is a State-Owned Business Institution in the form of Copartnership. More than fifty percent of its share represent the governmental property. Government, in this case, functions as fund accumulator from society, which is, turn, re-channeled to the society in the form or credit in effective and efficient way in relation to national economic development.

Credit supplied to society and or to Legal Body oftentimes faces the problem that frequently referred to as "Non Performing Loan".

Non Performing Loan may be caused by internal factors of the bank it self, either due to the lack of ability of bank management, debtor factors, or undisciplined debtors, and external factors such as economic, politics and natural disaster.

Non Performing Loan of Government Bank in the Legislation No. 49 1960 conceived of as a State Receivable. This Credit must first be deal with by the Credit Supplying Bank. If it fail to do so, it must be submitted to the Committee of State Receivable Affair. Repayment of state receivable by the Committee of State Receivable Affair (PUPN) executed by the Office of Receivable Service and State Auction (KP2LN) can be in cash, by installment, or by liquidation of the mortgage.

The current research aims at studying the well-balanced contractual terms between debtor and creditor, and also the authority of Committee of State Receivable Affair (PUPN) in this case Office or Receivable Service and State Auction (KP2LN) as execution institute of State Receivable pursuant according to the act No. 49 Prp 1960 about Committee of Business of State Receivable. The data analyzed using qualitative method elaborated in descriptive form by means of deductive method. The result of the study conclude that the solution of Stacked Credit by the of Office of Receivable Service and State Auction (KP2LN) has neither been effective nor efficient yet.

The Joint Statement Letter, with which its strength is equals to Court Decision having steadfast legal power, oftentimes sued by the debtor, including the price estimation of the mortgage by the transaction team. This is so when it has fixed legal power but perceived as not fulfilling the sense of justice and the benefit for all. Consequently, it is essential to revise or amend the act No. 49 Prp 1960 at the Committee of State Receivable Affair and the term of its implementation in order to manifest the rule of law, the sense of justice and the benefit to all in resolving the Non Performing Loan.

Key word : Non Performing Loan, Government Bank, and Credit Solution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan do'a kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM PADA PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA" dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Tesis ini dapat kami selesaikan berkat dukungan banyak pihak baik secara pribadi maupun Instansi. Untuk itu dengan rasa hormat serta dari lubuk hati yang dalam penulis mengucapkan terika kasih, terutama kepada :

1. Bapak DR. J. Gunarto Suhardi, SH.
2. Ibu TH. Anita Christiani, SH. M. Hum
3. Ibu DR. J. Sukmawati Sukamulja, MM. Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Bapak, Ibu dosen staf pengajar Program Pasca Sarjana Program Hukum Bisnis Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Bapak, Ibu staf Administrasi dan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Pimpinan dan Staf kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Yogyakarta.

7. Pimpinan dan Staf kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.
8. Pimpinan dan Staf kantor Wilayah PT. Bank BNI Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.
9. Pimpinan dan Staf kantor Wilayah PT. Bank Mandiri Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.
10. Pimpinan dan Staf Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta.
11. Pimpinan dan Staf Bank Pembangunan Daerah DI. Yogyakarta.
12. Ummi serta kedua mertuaku yang kumuliakan.
13. Ketua serta rekan-rekan Hakim dan Staf Pengadilan Negeri Wates.
14. Istriku tercinta Zuherlis dan ketiga anakku Andika Maulana, Anisa Azury, Destha Alissa yang memberi semangat setiap waktu untukku dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
15. Pihak-pihak lain baik secara pribadi maupun instansi yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga terwujudnya tesis ini.

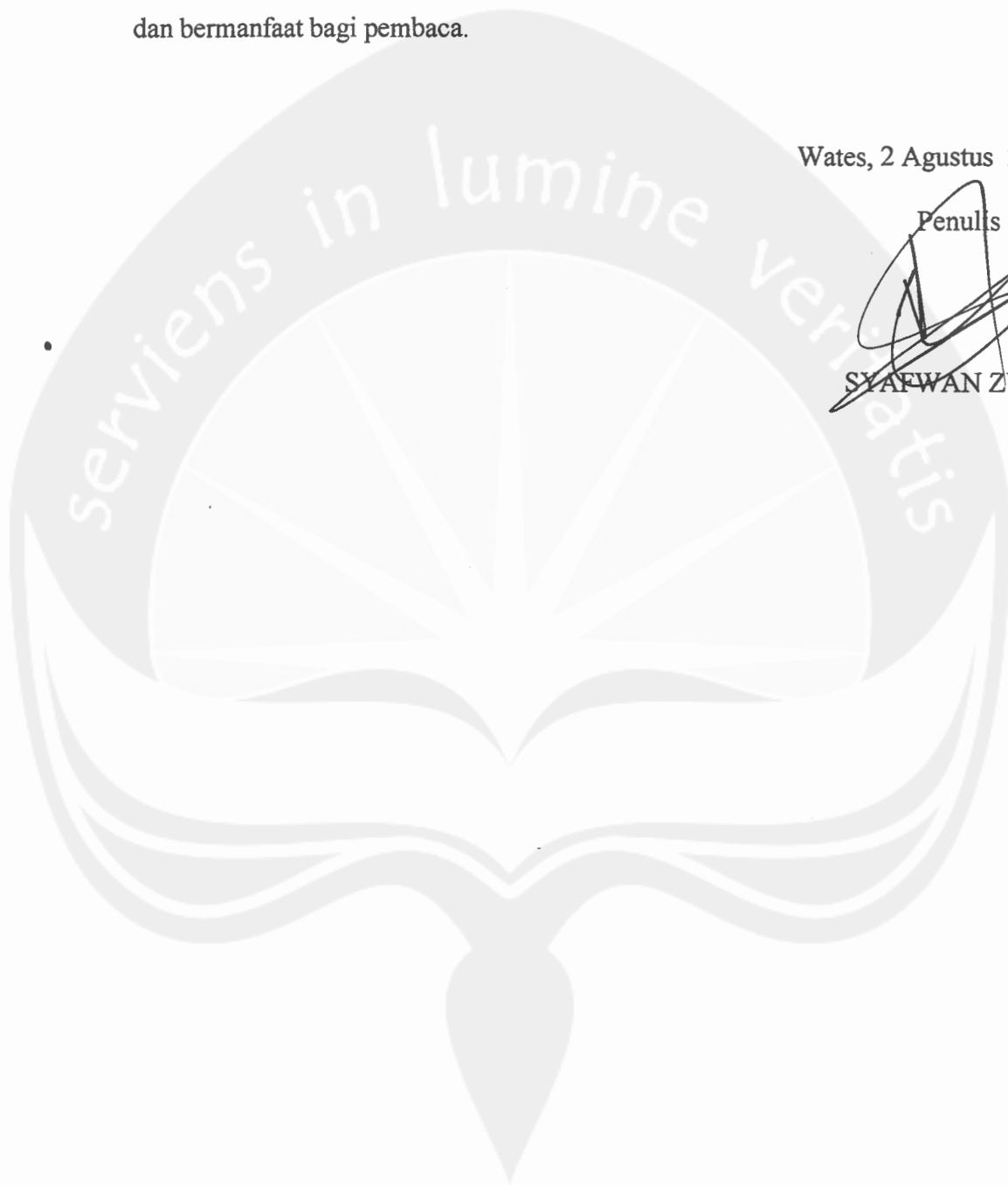
Penulis menyadari dengan sesungguhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat mendidik serta membangun untuk penyempurnaan tesis ini kearah yang lebih baik.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar - besarnya apabila penulis dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, semoga penulisan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Wates, 2 Agustus 2003

Penulis

SYAFWAN ZUBIR



DAFTAR TABEL

NO. TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
1	Kredit Bermasalah	36



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN	iv
INTISARI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Gambaran Umum Perbankan	11
2.1.1. Pengertian Bank	11
2.1.2. Jenis Perbankan	12

2.2.	Tinjauan Tentang Perjanjian dan Perjanjian Kredit	13
2.2.1.	Pengertian Perjanjian	13
2.2.2.	Cakap Melakukan Perikatan	15
2.2.3.	Perjanjian Kredit	17
2.2.4.	Prosedur Pemberian Kredit	20
2.2.5.	Bentuk Perjanjian Kredit Bank	22
2.2.6.	Jaminan Kredit	28
2.2.7.	Berakhir Perjanjian Kredit	30
2.2.8.	Kredit Bermasalah	32
2.2.9.	Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	37
2.3.	Panitia Urusan Piutang Negara	40
2.3.1.	Pengertian Piutang Negara	40
2.3.2.	Status dan Eksistensi Panitia Urusan Piutang Negara	45
2.3.3.	Prosedur Penyelesaian Piutang Negara	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Penelitian Kepustakaan	54
3.1.1.	Data	54
3.1.2.	Bahan	54
3.1.3.	Alat	56
3.2.	Penelitian Lapangan	56
3.2.1.	Data	56
3.2.2.	Lokasi Penelitian	57

3.2.3. Teknik Penentuan Sampel	57
3.2.4. Responden	57
3.2.5. Metode Pengumpulan Data	57
3.2.6. Alat Penelitian	58
3.2.7. Jalannya Penelitian	58
3.3. Metode Analisa Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bank	60
4.1.1. Status Bank Pemerintah	60
4.1.2. Bank Pemerintah Di D.I. Yogyakarta	62
4.2. Faktor Penyebab Kredit Macet	63
4.2.1. Faktor Intern Bank yang menjadi penyebab Kredit Macet ...	64
4.2.2. Debitur (Nasabah)	66
4.2.3. Faktor Ekstern	67
4.3. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Melalui KP2LN Yogyakarta	68
4.3.1. Penyerahan Pengurusan Kredit Macet	68
4.3.2. Tahapan Pelelangan yang dilakukan Oleh KP2LN	85
4.3.3. Biaya Administrasi Piutang Negara	98
4.3.4. Penarikan Pengurusan Piutang Negara	99
4.3.5. Gugatan atau Perlawanan dari Debitur/pihak Ketiga	100
4.3.6. Perlunasan	101

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran	104

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

